

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa penyusunan dan penyajian LKP harus menyesuaikan dasar SAP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Firdaus, Nadirsyah, & Fahlevi, 2015). Proses akuntansi atau tata keuangan telah berkembang dengan kemajuan sistem keuangan modern. Instansi pemerintah saat ini, harus meningkatkan kualitas kinerja keuangan agar dapat mengikuti perkembangan akuntansi karena sebagai pengguna informasi khususnya masyarakat menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, publikasi informasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemakai informasi, informasi dianggap bermanfaat jika dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pengguna informasi tersebut. (Mahaputra & Putra, 2014).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP No. 71 Tahun 2010). Konteks sektor publik,

akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (Pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Karakteristik yang harus dimiliki dalam laporan keuangan pemerintahan terdapat 4 (empat) unsur, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan. Laporan keuangan yang relevan akan berguna bagi penggunanya.

Laporan keuangan dikatakan andal apabila laporan keuangan yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, netral (tidak memihak pada satu pihak), serta dapat diverifikasi kebenarannya. Laporan keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, tetapi apabila informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan.

Laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lainnya. Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pengguna, yaitu masyarakat dan pemerintah. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan berkualitas apabila telah diaudit dan mendapatkan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) kategori laporan audit, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat apabila telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disajikan tepat waktu.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018-2021. Dalam pemeriksaan

tersebut Rokan Hulu meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang berarti opini Wajar Tanpa Pengecualian yang di berikan BPK terhadap pelaporan keuangan tersebut berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan (Inspektorat, 2022). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten rokan huluseluruhnya memenuhi karakteristik yang di syartakan atau termasuk laporan keuangan yang berkualitas.

Namun kualitas laporan keuangan yang berkualitas tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wayan, dkk 2020) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Dimana penlitian ini mendapatkan hasil bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut (Siti Irafah, dkk 2020) pengaruh kompetensi, sumber daya manusia, peran internal audit, dan kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, yang menggunakan Variabel independen dan Variabel dependen ini mendapatkan hasil Kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, dan kesuksesan penerapan sistem informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian (Lailatur Rohmah, dkk 2020) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengaruh pemahaman standar akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal. Dan mendapatkan hasil bahwa pengaruh

pemahaman standar akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota malang.

Berdasarkan penelitian (Rizki Afri Mulia, 2018) menyatakan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal. Dan mendapatkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut (Silvia Almar'atus sholohah, dkk 2019) Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh Good Government Governance, sistem Akuntansi pemerintahan, Pengawasan, Kualitas aparatur Pemerintahan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Akuntansi Keuangan. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Good Government Governance, sistem Akuntansi pemerintahan, Pengawasan, Kualitas aparatur Pemerintahan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang determinasi kualitas laporan keuangan berupa faktor sumber daya manusia, pengendalian internal, peran teknologi dan *good governance*. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. (Sukmaningrum, 2012) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Nugraheta (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta, sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini akan menguji faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain kompetensi sumber dayaManusia, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dan peran teknologi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas harus memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, sehingga laporan keuangan yang

disusun dapat berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daya manusia sebagai pilar utama instansi/organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dari tujuannya. Suatu sistem sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM tersebut yang terdiri dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014). Sumber daya manusia merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam organisasi, oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuannya.

Kualitas laporan keuangan badan pemerintah daerah dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu salah satunya adalah efektivitas pengendalian internal. Pengambilan variabel efektifitas sistem pengendalian internal didasarkan pada salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran suatu informasi. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa salah satu penyebab kualitas laporan keuangan tidak meningkat karena sistem pengendalian internal yang belum berfungsi secara efektif (BPK, IHPS 1 Tahun 2018). Seharusnya auditor internal melakukan review secara terus-menerus sejak proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta, pelaporan untuk mendeteksi lebih awal, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Herawati (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sukmaningtyas (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada DPPKAD Kabupaten Boyolali. Penelitian tersebut sejalan dengan peneliti Nugraheta (2017), Nurillah (2014), sudiarianti (2015), dan sukmaningrum (2012). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin baik.

Dengan semakin tingginya beban kerja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan juga dalam upaya penguatan kelembagaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, maka agar pelayanan dasar terhadap masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, sehingga dipandang perlu adanya peningkatan tipologi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah dimaksud. Dengan persetujuan bersama DPRD Rokan Hulu dan Bupati Rokan Hulu memutuskan Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Rokan hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dengan beberapa susunan sebagai berikut

Tabel 1. 1
OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

No	Daftar OPD Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu
1.	Sekretariat daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
5.	Dinas kesehatan
6.	Dinas kependudukan dan penacatatan sipil
7.	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
8.	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman
9.	Dinas tanaman pangan hortikultura
10.	Dinas peternakan dan perkebunan
11.	Dinas perindustrian dan perdagangan
12.	Dinas koperasi usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja
13.	Dinas pariwisata dan kebudayaan
14.	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15.	Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
16.	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
17.	Dinas lingkungan hidup
18.	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
19.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
20.	Dinas satuan polisi pamongpraja dan pemadam kebakaran
21.	Dinas perhubungan
22.	Dinas perpustakaan dan arsip
23.	Dinas komunikasi dan informatika
24.	Badan perencanaan pembangunan daerah
25.	Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan
26.	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
27.	Badan pendapatan daerah
28.	Kecamatan bangun purba A
29.	Kecamatan bonai darussalam tipe A
30.	Kecamatan kabun tipe A
31.	Kecamatan kepenuhan tipe A
32.	Kecamatan kepenuhan hulu tipe A
33.	Kecamatan kunto darussalam tipe A
34.	Kecamatan pagaran tapah darussalam tipe A
35.	Kecamatan pendalian iv koto tipe A
36.	Kecamatan rambah tipe A
37.	Kecamatan rambah hilir tipe A
38.	Kecamatan rambah samo tipe A
39.	Kecamatan rokan iv koto tipe A
40.	Kecamatan tambusai tipe A

41.	Kecamatan tambusai utara tipe A
42.	Kecamatan tandun tipe A
43.	Kecamatan ujung batu tipe A

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia,efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah , peran teknologi dan *good governanc* terhadap kualitas laporan keuangan pada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian maka penelitian ini diberi judul ”**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh seacara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah peran teknologi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah *Good Governance* berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

5. Apakah sumber daya manusia, pengendalian internal, peran teknologi dan *Good Governance* berpengaruh secara parsial terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh peran teknologi terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pengendalian internal peran teknologi dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan memberikan tambahan pengetahuan, serta referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Badan Organisasi Pemerintah Daerah sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan yang bersumber dari berbagai referensi terkait bidang yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk perbaikan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya pegawai bidang keuangan di instansi Pemerintah Daerah.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka perlu di adakan pembatasan masalah. Mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, adapun faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas

laporan keuangan maka diperlukan pembatasan masalah supaya lebih fokus dan mendalam. Selanjutnya penelitian ini hanya dibatasi untuk variabel sumber daya manusia, pengendalian internal, peran teknologi dan *good governance*. Pada penelitian ini terdapat sebanyak 43 dalam organisasi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Afri Mulia, 2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah Determinan Kualitas Laporan Keuangan Badan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan variabel Kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, peran teknologi dan *good governance* pada tahun 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian

BABIV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BABV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari saran untuk penelitia selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Zimmerman (1997) *agency problem* juga termasuk dalam organisasi pemerintah. Dalam hal ini rakyat sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agen* untuk menjalankan tugas pemerintahan. Menurut Supriyono, (2018) teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agen*. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada *agen* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agen* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*, Ichsan (2013). Jika *principal* dan *agen* memiliki tujuan yang sama maka *agen* akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *principal*.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria dan unsur-unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu :

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*), serta informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk pengambilan keputusan (*timeliness*)

b. Andal

Keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan berbanding tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

1. Dapat diverifikasi (*verifiable*)

Suatu informasi diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

3. Penyajian secara wajar (*representation faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

c. Dapat dipahami

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Pemerintah daerah merupakan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

Perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah daerah menurut undang-undang no 23 tahun 2014 Pasal 285 fungsi dari pemerintah daerah adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang handal merupakan asset penting untuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dalam sebuah laporan keuangan sesuai dengan SAP dan sebagai dasar pengambilan keputusan baik bagi pengguna internal maupun eksternal.

Menurut Sedarmayanti (2017) karakteristik sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

a) Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

b) Keterampilan

Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang. Pegawai dengan pelayanan baik dan maksimal misalnya keterampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

c) Sikap

Aspek yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Afandi, P (2018) meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, maupun

prilaku. Pegawai yang memiliki wawasan serta pendidikan tinggi diharapkan bisa menciptakan pekerjaan yang unggul dan produktif. Ketrampilan mengacu pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang bersifat teknis. Kemampuan terbentuk dari ekumpulan kompetensi yang dimiliki pegawai.

2.1.5 Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalam (Sukmaningrum, 2012) Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan 5 indikator menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi.

2.1.6 Peran Teknologi

Husna (2017) berpendapat bahwa pemanfaatan informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Wardani dan Ika (2017) menyatakan bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Proses kerja secara elektronik, dimaksud untuk mengetahui apakah instansi memiliki komputer yang cukup dan apakah proses kerja sudah dilakukan secara elektronik.
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan, dimaksud untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan data oleh instansi.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet, dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Informasi dengan memanfaatkan internet.
4. Sistem Manajemen, dimaksud untuk mengetahui informasi yang dihasilkan memiliki integrasi.
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, dimaksud untuk mengetahui jadwal pemeliharaan barang elektronik, perbaikan pada peralatan yang rusak dan penggunaan antivirus pada computer.

2.1.7 Good Governance

Setiap kali kita menyaksikan pembicaraan tentang masa depan pembangunan suatu bangsa, kita bertemu dengan kata “*Good Governance*”. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terwujudnya *Good Governance* merupakan cita cita luhur seluruh masyarakat di negeri manapun didunia.

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun kelayakan publik (Azlina dan amelia,2014)

Bersamaan dengan reformasi dari sitem politik kearah yang lebih demokratis, berkembang pula pemikiran tentang “*good governance*” atau pemerintahan (pengurusan pemerintah) yang baik. Adapun indikator dari variabel *Good Governance* ini adalah transparansi, partipasi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, dan kesetaraan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian yang Relevan

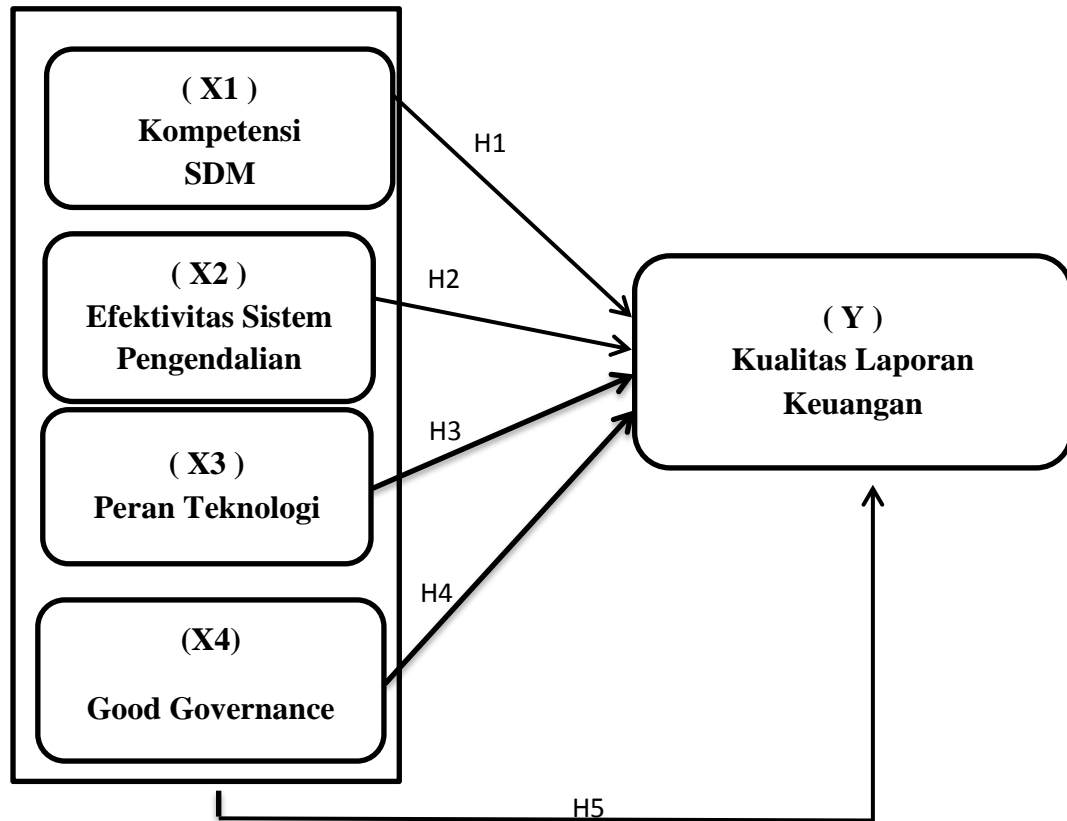
Nama	Judul	Variabel	Hasil
Ni luh wayan tiya lestari, Ni nyoman sri rahayu, Trisna dewi (2020)	Pengaruh pemahaman Akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem	Variabel independen (X) -Pemahaman akuntansi -Pemanfaatan sistem informasi akuntansi	Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan system informasi akuntansi berpengaruh signifikan

	pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.	-Sistem pengendalian internal Variabel dependen(Y) -Kualitas laporan keuangan	terhadap kualitas laporan keuangan dan system pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Siti irafah, Eka nurmala sari, Muhyarsyah (2020)	Pengaruh kompetensi, sumber daya manusia, peran internal audit, dan kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel independen (X) -Kompetensi sumber daya manusia -Peran internal audit -Kesuksesan penerapan sistem informasi Variabel dependen (Y) -Kualitas laporan keuangan	Kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit dan kesuksesan penerapan sistem informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
Lailatur rohmah, Noor shodiq askandar, Arista fauzi kartika sari (2020)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota malang	Variabel independen (X) -Pengaruh pemahaman standar akuntansi -Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah -pengendalian internal Variabel dependen -kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pemahaman standar akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan dan system pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Rizki afri mulia	Analisis faktor	Variabel	Kompetensi sumber

(2018)	faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.	independen (X) -Kompetensi sumber daya manusia -sistem pengendalian internal Variable dependen (Y) -Kualitas laporan keuangan	daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan system pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Silvia almar atus sholohah, Ardiani ika sulistiawati, Aprih santoso (2019)	Kualitas laporan keuangan dan factor factor yang mempengaruhinya.	Variabel independen (X) -Good Government governance -sistem akuntansi pemerintahan -pengawasan -kualitas aparatur pemerintahan daerah -sumber daya manusia -sistem akuntansi keuangan Variabel dependen (Y) -Kualitas laporan keuangan	Penerapan Good Government Governance, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Luh sukriani, Putu eka dianita marvianti dewi, Made arie wahyuni (2018)	Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan bumdes di	Variabel independen (X) -Tingkat pendidikan -Pengalaman kerja -Pelatihan -Penggunaan teknologi	Tingkat pendidikan, Pengalaman kerja, pelatihan dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

	kecamatan Negara.	informasi Variabel dependen (Y) -Kualitas laporan keuangan	
--	-------------------	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut Sudjana hipotesis diartikan sebagai asumsi (dugaan) sementara terhadap suatu hal yang dibuat. Umumnya, asumsi ini dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang dibutuhkan konfirmasi atau pengecekan, maka suatu hipotesis harus di uji dan dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, perumusan masalah, serta penelitian terdahulu, hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemampuan SDM meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dapat memungkinkan laporan keuangan memenuhi karakteristiknya, sehingga memungkinkan untuk menerapkan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi untuk memperoleh laporan keuangan berkualitas tinggi. Disisi lain, jika sumber daya manusia tidak sepenuhnya kompeten, maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat di tetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Diduga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 sistem penegndalian internal merupakan proses yang integral pada tindakam dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiian untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Diduga efektifitas system pengendalian internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh peran teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi saat ini sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan dalam segala aspek kegiatan, terutama dalam bisnis. Adanya teknologi informasi memberikan banyak keuntungan, akan tetapi penerapan teknologi informasi tidak gampang, apabila tidak mengetahui atau dapat menggunakan teknologi informasi maka akan merugikan sehingga akan menambah biaya. Keterbatasan penerapan teknologi informasi ini terkait dengan *hardware*, *software*, pemutakhiran data, keadaan sumber daya manusia serta biaya terbatas. Hambatan ini merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah. Maka penelitian ini bertujuan menguji kembali hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Diduga peran teknologi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

Tata kelola yang baik didefinisikan sebagai suatu proses sekaligus struktur yang memandu hubungan politik dan sosial ekonomi dan mengacu pada beberapa karakteristik atau indikator seperti: partisipasi, supremasi

hukum, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Perspektif warga negara tentang tata pemerintahan yang baik adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Diduga *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Organisasi Pemerintah Daerah.

5. Pengaruh SDM, Pengendalian internal, peran teknologi dan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian (rizki afri mulia, 2018) menyatakan sumber daya manusia, pengendalian internal, peran teknologi dan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Diduga kompetensi sumber daya manusia, efektifitas sistem pengendalian, peran teknologi dan *Good Governance* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan badan organisasi Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu dan terdiri dari 24 Badan Organisasi Pemerintah Daerah. Masalah yang diteliti adalah Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Peran Teknologi dan *Good Governance* terhadap kinerja pada OPD Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif dimana pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta menyimpulkan berbagai situasi, kejadian atau suatu variabel penelitian berdasarkan kejadian yang dapat di gambarkan, di observasi maupun di wawancara yang bentuk deskripsinya berupa angka atau numerik.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Populasi dalam penelitian ini adalah 43 OPD di Kabupaten Rokan Hulu.

Rincian Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hulu

yang menjadi populasi dalam penelitian ini disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 3. 1
Populasi Penelitian

No	Daftar OPD Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu
1	Sekretariat daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
5	Dinas kesehatan
6	Dinas kependudukan dan penacatatan sipil
7	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
8	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman
9	Dinas tanaman pangan hortikultura
10	Dinas peternakan dan perkebunan
11	Dinas perindustrian dan perdagangan
12	Dinas koperasi usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja
13	Dinas pariwisata dan kebudayaan
14	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15	Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
16	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
17	Dinas lingkungan hidup
18	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
19	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
20	Dinas satuan polisi pamongpraja dan pemadam kebakaran
21	Dinas perhubungan
22	Dinas perpustakaan dan arsip
23	Dinas komunikasi dan informatika
24	Badan perencanaan pembangunan daerah
25	Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan
26	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
27	Badan pendapatan daerah
28	Kecamatan bangun purba A
29	Kecamatan bonai darussalam tipe A
30	Kecamatan kabun tipe A
31	Kecamatan kepenuhan tipe A
32	Kecamatan kepenuhan hulu tipe A
33	Kecamatan kunto darussalam tipe A
34	Kecamatan pagaran tapah darussalam tipe A
35	Kecamatan pendalian iv koto tipe A
36	Kecamatan rambah tipe A
37	Kecamatan rambah hilir tipe A
38	Kecamatan rambah samo tipe A

39	Kecamatan rokan iv koto tipe A
40	Kecamatan tambusai tipe A
41	Kecamatan tambusai utara tipe A
42	Kecamatan tandun tipe A
43	Kecamatan ujung batu tipe A

Sumber : peraturan daerah nomor 2 tahun 2020

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*, yaitu suatu mode pemilihan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel penelitian. Adapun kriteria kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pekerja pada bagian pengelolaan keuangan dan pekerja yang lebih dari satu tahun. Pengambilan sampel dalam penelitian ini disebabkan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Pemilihan badan, dinas dan inspektorat dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran dari pemerintah daerah. Bendahara dan staff keuangan merupakan responden dalam 25 OPD.

Tabel 3. 2
Sampel Penelitian

No	Nama	Responden
1	Inspektorat	2
2	Dinas pendidikan pemuda dan olahraga	2
3	Dinas kesehatan	2
4	Dinas kependudukan dan penacatatan sipil	2
5	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	2
6	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman	2
7	Dinas tanaman pangan hortikultura	2
8	Dinas peternakan dan perkebunan	2
9	Dinas perindustrian dan perdagangan	2
10	Dinas koperasi usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja	2

11	Dinas pariwisata dan kebudayaan	2
12	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2
13	Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa	2
14	Dinas pengendalian pendudukan dan keluarga berencana	2
15	Dinas lingkungan hidup	2
16	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	2
17	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	2
18	Dinas satuan polisi pamongpraja dan pemadam kebakaran	2
19	Dinas perhubungan	2
20	Dinas perpustakaan dan arsip	2
21	Dinas komunikasi dan informatika	2
22	Badan perencanaan pembangunan daerah	2
23	Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan	2
24	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah	2
25	Badan pendapatan daerah	2

Sumber : Data Olahan 2023

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi yang di peroleh dari informan berupa hasil kusioner atau amgket yang disebarakan. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis data secara mendalam berupa angka. Jenis data yang dihasilkan dalam penelitian ini data interval. Menurut (Sugiyono, 2019:11) data interval adalah data kuantitatif yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kusioner (angket) yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan kusioner langsung dimana peneliti langsung membagikan kusioner tersebut langsung kepada OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Jawaban yang diberikan oleh responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada pengukuran skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2020)

Responden diminta menjawab pernyataan tersebut dalam bentuk skala likert mengukur sikap responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan, yang terbagi menjadi :

1= Sangat tidak setuju (STS)

2= Tidak Setuju (TS)

3= Ragu Ragu (R)

4= Setuju (S)

5= Sangat Setuju (SS)

Jawaban yang telah diberikan oleh responden kemudian akan diolah dengan komputer dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 26 (*Statiscal Package For The Sosial Sciens*)

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian ini “determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten rokan hulu “. Ada 5 variabel pada penelitian ini yaitu kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, peran teknologi, good governance dan kualitas laporan keuangan.

1.) Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan pada 25 OPD (Y). Dimana suatu laporan keuangan yang berkualitas mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel ini ukur dengan indikator indikator yang di adopsi dari penelitian Agustina (2020), yaitu :

- a) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya
- b) Melaporkan hasil operasi
- c) Melaporkan kondisi keuangan

2.) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait. Penelitian ini memiliki 4 variabel independen, yaitu :

1. Kompetensi SDM

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Variabel kompetensi sumber daya manusia menggunakan 3 indikator yaitu pengetahuan dan ketrampilan dan perilaku. Variabel sumber daya manusia diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 2015).

2. Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian Intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 5 indikator menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 2015). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) —Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju.

3. Peran teknologi

Menurut Tata Sutabri (2014:3) pemanfaatan informasi ialah teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Menurut Wardani dan Ika (2017) indikator peran teknologi informasi antara lain :

- 1) Proses kerja secara elektronik
- 2) Pengolahan dan penyimpanan data keuangan
- 3) Pengolahan informasi dengan jaringan internet
- 4) Sistem manajemen
- 5) Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer

4. *Good Governance*

Menurut Azlina dan Amelia (2014) “*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.”

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena

itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private Governance*, *corporate governance*, dan *banking governanace*. Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yg baik. Baik yang dimaksud adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip-prinsip dasar *good governance*. diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipan.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah kuesioner kembali dan telah diisi oleh responden merupakan metode analisis yang sesuai untuk digunakan. Selanjutnya yaitu menghitung bobot jawaban dari pertanyaan setiap variabel. Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu uji statistik deskriptif, uji hipotesis, dan analisis linear berganda. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan software SPSS.

Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas / response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ predictor (X1, X2, X3,...Xn). tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas / respense (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ predictor (X1, X2, X3,...Xn) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya (Yuliara,2016).

Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Yang mana :

Y = Kualitas laporan keuangan

a = konstanta

b_1 = nilai koefisien regresi X_1

b_2 = nilai koefisien regresi X_2

b_3 = nilai koefisien regresi X_3

X_1 = kompetensi SDM

X_2 = pengetahuan akuntansi

X_3 = sistem informasi akuntansi

E = nilai *error*

3.7.1 Uji Deskriptif

Analisis adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H_0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan (Nasution, 2017).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah data dikatakan layak adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Ujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji

normalitas. Uji multikolinearitas, Uji autokolerasi. Uji multikolonieritas dan Uji heteroskedastistas.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dalam normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. (Gozali, 2014)

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variable independen yang memiliki kepemilikan antar variable independen dalam suatu model. Kemiripan antar variable independen akan mengakibatkan kolerasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Sujarweni, 2014)

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

VIF >10 : artinya, terdapat gejala multikolinearitas

VIF <10 : artinya, tidak terdapat gejala multikolinearitas

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi Heteroskedastisitas jika, titik titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali penyebaran titik-titik data tidak bepola (Sujarweni, 2014).

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antara variable pengganggu pada periode tertentu dengan variable sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variable pengganggu nilai Durbin Watson dibandingkan dengan table Durbin Watson (d_l dan d_u). Kriteria jika $d_u < d_{hitung} < 4-d_u$ maka terjadi autokolerasi (Sujarweni, 2014).

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variable independen terhadap variable dependen.

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara sumber daya manusia, pengendalian internal, peran teknologi dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

A : Konstanta

B1, b2, b3 : Koefisien Regresi

X1 : Sumber Daya Manusia

X2 : Pengendalian Internal

X3 : Peran Teknologi

X4 : Good Governance

e : *Error*

3.7.4 Uji *Adjusted R Square* (R^2)

Ketetapan pemikiran model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variable independen dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang semakin 0 besar atau semakin mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable terikat. (Gozali, 2014)

3.7.5 Uji – F

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama – sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Dimana F-hitung dan F-tabel

dicari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18 (Sugiyono, 2020).

Dasar keputusan Uji :

1. Jika nilai probabilitas signifikan $\leq 0,05$ $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai probabilitas signifikan $\geq 0,05$ $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.6 Uji – T

Uji Hipotesis dengan t_{hitung} digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen. T_{hitung} diketahui dengan menggunakan Software SPSS 18. Menguji apakah secara parsial (individu) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara t_{hitung} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah observasi (Sugiyono, 2020).

Dasar keputusan uji :

1. Jika $sig \leq 0,05$ dan $t_{hitung} \geq t_{table}$, maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y .
2. Jika $sig \geq 0,05$ dan $t_{hitung} \leq t_{table}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y .